

# Demonstrasi Massa Kaos Merah Terhadap Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva di Thailand Pada Tahun 2010

## *(The Demonstration Of The Red Shirt Mass To Prime Minister Abhisit Vejjajiva In Thailand In 2010 )*

Dody Bayu Prasetyo, Drs. A. Eby Hara, M.A. Ph.D, Heri Alfian, S. Sos, M. Si  
Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [DPU@unej.ac.id](mailto:DPU@unej.ac.id)

### Abstrak

Thailand merupakan negara yang penuh dengan konflik politik dalam negeri sepanjang sejarahnya. Konflik politik ini disebabkan adanya persaingan antar-elit di Thailand sehingga menyebabkan banyak terjadinya kudeta dan demonstrasi. Begitupula demonstrasi besar dari massa Kaos Merah (*Red Shirt*) pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra terhadap pemerintahan PM Abhisit Vejjajiva pada bulan Maret 2010 disebabkan oleh konflik elit yang terjadi antara Thaksin, militer dan Abhisit. Thaksin merupakan Perdana Menteri yang digulingkan pada kudeta militer pada 2006, sedangkan Abhisit merupakan tokoh oposisi di masa Thaksin dan diduga bersama-sama militer Thailand berupaya menghilangkan pengaruh Thaksin di Thailand.

**Kata Kunci:** demonstrasi, kaos merah, kudeta, konflik elit, Thailand.

### Abstract

*Thailand is a country full of political conflict in the country throughout its history. political conflict was caused by inter-elite competition in Thailand that led to many of the coup and demonstrations. Likewise, a great demonstration of mass Red Shirt supporters of ousted Prime Minister Thaksin Shinawatra, Prime Minister Abhisit Vejjajiva's government in March 2010 due to the conflict that took place between Thaksin's elite, the military and the Abhisit. Prime Minister Thaksin was ousted in a military coup in 2006, Abhisit is an opposition figure in the alleged Thaksin and Thailand's military jointly work to eliminate the influence of Thaksin in Thailand.*

**Keywords:** *protests, red shirts, coups, elite conflict, Thailand.*

### Pendahuluan

Momentum demokratisasi politik Thailand dimulai pada tahun 1932 ketika terjadi reformasi politik untuk menggulingkan rezim monarki absolut yang saat itu diperintah oleh Raja Prajadhipok dengan gelar Rama VII (1925–1935). Raja Prajadhipok saat itu memberlakukan kebijakan pemotongan gaji dan pengurangan pegawai besar-besaran yang menyebabkan meningkatnya pengangguran. Kebijakan tersebut membuat banyak kalangan merasa kecewa dan terpukul terutama kalangan perwira muda. Maka golongan intelektual yang dipimpin oleh Pridi Banomyong dan dari kalangan militer yang dipimpin oleh Phibin Songgram melancarkan revolusi tak berdarah pada tanggal 24 Juni 1932 untuk merubah sistem monarki absolut menjadi monarki konstitusional.<sup>[1]</sup>

Golongan intelektual dan golongan dari kalangan militer mengeluarkan ultimatum selama satu jam kepada raja untuk menanyakan persetujuannya untuk mengganti sistem monarki absolut dengan sistem monarki konstitusional. Raja menyetujui tuntutan tersebut dan mengatakan bahwa dia telah mempertimbangkan tuntutan tersebut. Akhirnya pada

10 Desember 1932, Raja Prajadhipok menandatangani konstitusi pertama Thailand, yang menandai berakhirnya 800 tahun kekuasaan monarki absolut. Momentum itu yang menjadikan Thailand ke depan menjadi salah satu negara yang penuh dengan konflik politik di kawasan Asia Tenggara. Hampir tidak ada pergantian kekuasaan di negara ini berjalan dengan tertib dan lancar, jika tidak dengan jalan kudeta maka penggulingan kekuasaan melalui sebuah aksi massa menjadi pilihan yang biasa untuk menjatuhkan pemimpin di negara ini.

Budaya politik di negara berkembang seperti di Thailand sangat kental dengan masalah kudeta militer dan rezim junta militer. Tak heran jika proses demokratisasi di Thailand mengalami hambatan dan tantangan menuju sistem demokrasi yang sesungguhnya. Tentunya dinamika ini tak lepas juga dari budaya politik masyarakat Thailand yang masih bersandar dan berpegang pada nilai-nilai tradisional, sementara di dalam demokrasi membutuhkan nilai-nilai kontemporer yang mengacu pada budaya Barat. Hal inilah yang kemudian berimplikasi pada pembentukan *state building* dan konstitusi yang mengatur distribusi kekuasaan

politik Thailand dimana selalu diwarnai oleh perebutan dan persaingan antara elit militer, sipil, dan cendekiawan.

Nilai paternalisme dan patriakal dalam budaya Thailand masih melekat erat, dimana mereka menganggap raja sebagai "father" dalam mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Selain itu, raja dianggap sebagai perwakilan Wisnu, Shiwa, dan Budhisattava yang merupakan titisan dewa. Sehingga tak heran bila masyarakat Thailand lebih mencintai raja daripada politik. Segala tindak raja merupakan pengejawantahan dewa yang harus dipatuhi. Hal ini kemudian bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dilandaskan pada nilai-nilai liberal. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bertentangan tapi nilai tradisional tersebut tetap dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Thailand. Akibatnya, budaya politik dan derajat partisipasi masyarakat Thailand sangat pasif. Padahal untuk membangun sistem demokrasi diperlukan budaya dan derajat partisipasi politik yang signifikan, yaitu sebuah budaya politik partisipan dan subjek. Implikasinya adalah, dengan kepasifan politik masyarakat Thailand, maka perebutan kekuasaan antara militer, sipil, dan cendekiawan selalu terjadi dan ini menjadi salah satu problem lain dalam demokrasi di Thailand. Elit militer merasa dirinya memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam menjalankan pemerintahan dan negara karena latar belakang pendidikan akademi militer dapat membuat mereka berpikir strategis dan taktis yang memang diperlukan oleh pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, secara historis mereka menganggap dirinya berjasa atas pertahanan dan keamanan Thailand dari kekuatan eksternal baik pada zaman monarki maupun saat revolusi. Di pihak lain, sipil menganggap bahwa masalah politik merupakan wilayah sipil yang harus lepas dari campur tangan militer. Mereka cenderung mendukung profesionalisme militer daripada fungsi militer di ranah politik. Anggapan mereka bahwa campur tangan militer dapat menghambat proses politik dan demokrasi. Menurut Sundhaussen (1999) bahwa kebiasaan militer cenderung anti-demokrasi. Lanjutnya bahwa persepsi tentang lawan dan bagaimana berurusan dengan mereka sering kali menggiring rezim militer memperlakukan lawan politik lebih keras dari sepatutnya sehingga merintangai penyelesaian politik. Sementara pihak cendekiawan menganggap bahwa dalam menjalankan pemerintahan dan negara diperlukan sebuah kerangka berpikir dan ilmu mengenai pemerintahan dan politik dimana hanya kaum cendekiawan itulah yang bisa melakukan. Dengan pondasi pengetahuan dan ilmu yang mereka miliki tersebut mereka menganggap bisa menjalankan dan selalu menemukan penyelesaian masalah dalam menghadapi krisis.

Perselisihan dan persaingan politik tersebut pada hakikatnya tak membawa masyarakat Thailand pada kondisi *riot* seperti di Filipina ataupun Myanmar. Karena peran raja tetap eksis sebagai simbol zaman keemasan Thailand dan sebagai pengayom masyarakat Thailand. Setidaknya pandangan tersebut menjadikan masyarakat Thailand sebagai masyarakat yang "tentram" tanpa ada pertumpahan darah sebagai akibat persaingan kaum elit tersebut.[2]

Krisis politik terakhir yang terjadi di Thailand adalah demonstrasi dari kelompok Massa Kaos Merah terhadap pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva pada tahun

2010. Massa Kaos Merah merupakan kelompok pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2006. Demonstrasi tersebut dilakukan sebagai protes terhadap tindakan militer dalam kudeta tahun 2006 serta pemerintahan Abhisit yang inkonstitusional, selain adanya konflik antar-elit.

### Metode Penelitian

Metode yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Metode pengumpulan data adalah tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penulisan terhadap sumber dan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Sedangkan metode analisis data digunakan cara berfikir deduktif yaitu menjelaskan tentang sesuatu yang sifatnya umum menuju ke sesuatu yang sifatnya lebih khusus, atau menjelaskan teoritis atas fakta yang bersifat konkret. Penulisan penelitian ini juga menggunakan metode analisa deskriptif-kualitatif. Data akan dianalisa secara lebih lanjut guna mencari fakta-fakta yang nantinya akan mendukung hasil akhir dari penulisan yang dilakukan. Hal ini dilakukan karena data-data dan informasi yang diperoleh penulis merupakan sebuah data yang bersifat sekunder, sehingga data yang telah diperoleh tidak dapat dilakukan pengukuran secara langsung. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah teori konflik elit.

### Hasil dan Pembahasan

Thailand adalah negara yang berbentuk kerajaan konstitusional dan tidak mempunyai dasar falsafah yang tertulis secara jelas.[3] Sehingga konflik yang bersifat kekerasan yang berupa kudeta sering terjadi di Thailand. Konflik politik yang kerap terjadi di Thailand merupakan konflik yang diwarnai oleh kepentingan kelas elit di Thailand. Konflik elit adalah konflik atau pertentangan yang terjadi antara elit-elit politik di dalam suatu pemerintahan di mana pihak yang satu berupaya untuk merebut atau mendapatkan sumber-sumber kekuasaan dan satu pihak lain berupaya untuk mempertahankan sumber-sumber kekuasaan. Bahkan aksi-kudeta berlatar belakang kepentingan elit ini menyebabkan Thailand mengalami pergantian perdana menteri. Thailand tercatat selama 74 tahun sejak monarki absolut digantikan oleh monarki konstitusional, dari tahun 1932 hingga 2006, telah terjadi 40 pergantian perdana menteri dengan 25 figur perdana menteri dan 25 kali kudeta beserta percobaan kudeta yang gagal. Jika dirunut dari 20 tahun terakhir saja sejak masa pemerintahan Perdana Menteri Prem Tinsulaoda (1980–1988) hingga Perdana Menteri Thaksin Shinawatra (2001–2006), telah ada 12 kali pergantian perdana menteri dengan 8 figur perdana menteri dan 7 kali kudeta serta percobaan kudeta. Kudeta terakhir di Thailand terjadi pada era pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada 19 September 2006.

Pada dasarnya kudeta militer Thailand bisa ditelusuri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal

militer. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi militer sendiri berupa kepentingan organisasi atau kepentingan kelompok yang ada di dalam organisasi tersebut, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor pemicu yang muncul dari luar organisasi berupa kondisi sosial, ekonomi dan politik yang memicu kudeta.[4]

Faktor internal yang mendorong militer untuk melancarkan kudeta terhadap Perdana Menteri Thaksin Shinawatra adalah adanya konflik kepentingan di antara klik-klik di pemerintahan Thailand dan usaha Thaksin yang mengabaikan aspirasi para elit militer dalam *reshuffle* militer tahunan Thailand menjadi indikasi utamanya. Seperti yang dikemukakan oleh Eric A. Nordlinger bahwa salah satu dorongan yang menyebabkan militer untuk campur tangan dalam pemerintahan sipil yaitu campur tangan dalam otonomi militer. Selama menjabat sebagai perdana menteri, Thaksin juga mencoba untuk melakukan hal itu.

Pada tahun 2003, Thaksin mempromosikan sepupunya Jenderal Chaisit Shinawatra untuk menduduki posisi Komandan Angkatan Bersenjata, padahal Chaisit tidak begitu populer di kalangan militer. Thaksin juga berupaya untuk menaikkan kelompok Pra-Kadet Kelas 10 ke posisi penting di Divisi Tentara Pertama. Daftar tersebut pada akhirnya memicu konflik antara Thaksin dengan Dewan Penasehat Raja dan pejabat senior militer. Thaksin juga berupaya agar Mayor Jenderal Prin Suwanth, rekannya, menjadi Komandan Divisi Tentara Pertama. Sekutu Prin, Mayjen Daopong Ratanasuvan juga direkomendasikan untuk menjadi penguasa di Infanteri Pertama. Apabila *reshuffle* militer yang diajukan Perdana Menteri Thaksin terlaksana, maka Thaksin akan memiliki rantai komando yang kuat atas pergerakan militer dan keamanan di Bangkok.[5]

Faktor eksternal yang dilatarbelakangi ekonomi yang menyebabkan militer melakukan kudeta adalah adanya korupsi dan kolusi yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Semenjak berkuasa tahun 2001, kekayaan Thaksin lama semakin meningkat pesat. Majalah Forbes mengatakan bahwa Thaksin adalah orang terkaya keempat di Thailand dengan kekayaan bersih sekitar 2,2 miliar Dollar AS. Dengan kekayaan yang dimiliki secepat ini, membuat rakyat meyakini bahwa hasil yang diperoleh adalah melalui penyalahgunaan kekuasaan, melakukan praktek nepotisme dan tindakan-tindakan lain yang merugikan negara. Thaksin juga diduga telah melepas perusahaan penting nasional Thailand yang bergerak di bidang telekomunikasi ke penguasaan asing. Bagi kalangan menengah perkotaan, penjualan aset nasional yang sangat vital tersebut merupakan kesalahan besar Thaksin karena Thaksin dinilai tidak nasionalis dan patriotis. Apalagi penguasaan asing atas perusahaan telekomunikasi itu dianggap juga menempatkan Thailand pada posisi rawan dari kemungkinan ancaman pihak luar. Kebijakan-kebijakan Thaksin yang dianggap merugikan masyarakat elit Thailand lainnya adalah kebijakan *Thaksinomics* diantaranya yaitu subsidi langsung tunai kepada penduduk pedesaan, moratorium utang dan selama tiga tahun bagi petani, penyaluran kredit murah kepada petani, penduduk pedesaan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selain itu pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik,

program pelayanan kesehatan murah rumah sakit-rumah sakit negara, intensif untuk pengembangan UKM di pedesaan, mendorong privatisasi badan-badan usaha milik negara dan menggalakkan mega proyek termasuk investasi 50 miliar di infrastruktur umum seperti jalan raya dan pembangunan bandara internasional yang baru.[6] Kebijakan yang membuat Perdana Menteri Thaksin Shinawatra populer di kalangan petani ini kemudian menjadi kontroversi dan dipertanyakan setelah perekonomian mengalami inflasi, defisit dan pertumbuhan ekonomi yang semula melonjak kembali terpuruk setelah pemerintah terpaksa menghapuskan subsidi BBM. Gaya kepemimpinan otoriter dan kesewenang-wenangan membuat Thaksin menghadapi banyak oposisi hingga berakhir dengan cara dikudeta. Kudeta yang dilancarkan oleh militer tersebut dilakukan dalam rangka memulihkan keadaan.

Sedangkan faktor eksternal yang dilatarbelakangi oleh politik adalah akibat kebijakan Thaksin yang represif terhadap masyarakat di wilayah Thailand Selatan dan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan Thaksin dalam Pemilu 2006.

Namun di mata masyarakat miskin Thailand, Thaksin Shinawatra merupakan sosok pemimpin Thailand yang sangat dicintai dan didukung oleh rakyat Thailand yang sebagian besar merupakan masyarakat pedesaan. Sejak menjabat sebagai perdana menteri Thailand, Thaksin telah mengulirkan berbagai kebijakan yang pro-rakyat, khususnya rakyat miskin pedesaan. Kebijakan pro-rakyat Thaksin di antaranya adalah kebijakan *Thaksinomics*, pemberantasan narkoba, kebijakan desentralisasi sekolah dan program perawatan kesehatan umum. Pada awal pemerintahannya Thaksin memimpin Thailand keluar dari krisis finansial Asia. Salah satunya adalah ia menggunakan kekayaannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani pasca krisis dan mengeluarkan Thailand dari pinjaman dana yang berasal dari Dana Moneter Internasional (IMF). Janji tersebut ia buktikan dengan Thailand menjadi salah satu negara yang cepat keluar dari krisis Asia dan terbebas dari campur tangan IMF setelah Korea Selatan. Nama Thaksin kemudian menjadi populer karena berbagai kebijakan untuk menolong orang miskin di pedesaan dan petani yang terbukti mampu menggerakkan permintaan dalam negeri dan ekonomi Thailand saat itu.

Keberhasilan Thaksin dinilai sangat berpengaruh bagi wilayah pedesaan. Bagi kaum petani dan masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan, nama Thaksin sangat dikenal luas karena ia adalah pemimpin pertama Thailand yang mau turun ke bawah mendengarkan kebutuhan dan aspirasi jutaan penduduk yang masih terpinggirkan. Dibandingkan pemimpin Thailand sebelumnya, Thaksin mampu mendekatkan pemerintah dengan masyarakat bawah. Salah satunya adalah program kesehatan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk pergi ke dokter dan mendapatkan jaminan kesehatan sebanyak 35 Bath (setara dengan 1 Dollar).

Oleh karena kebijakan-kebijakan Thaksin yang pro-rakyat itulah Thaksin memiliki banyak pendukung. Para pendukung Thaksin menamakan diri mereka sebagai Kelompok Kaos Merah (*Red Shirts*) yang terdiri dari kaum petani, kaum miskin pedesaan dan perkotaan, akademisi

serta para aktivis sosial. Thaksin yang masih menjadi “elit” bagi para pendukungnya mampu membuat massa pendukungnya turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi untuk mengecam aksi kudeta militer dalam menggulingkan Thaksin dan menentang pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva yang dianggap sebagai pemerintahan diktator, tidak demokratis dan inkonstitusional karena merupakan perpanjangan tangan dari militer dan elit politik kelas menengah. Abhisit terpilih menjadi perdana menteri Thailand setelah melalui pemungutan suara di parlemen yang tidak mendapat dukungan dari para pendukung Thaksin namun mendapat dukungan penuh dari kelompok kelas menengah dan kaum royalis yang merupakan dua kelompok selain militer yang diduga penyebab lengsernya Thaksin dari posisi perdana menteri. Selain itu pada saat terjadinya kudeta, junta militer membatalkan konstitusi 1997 yang merupakan “Konstitusi Rakyat” yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi ini mencerminkan nilai demokratis. Hasil dari konstitusi ini salah satunya adalah pemilihan umum tahun 2001 yang menjadi pemilihan umum paling demokratis di Thailand.

Demonstrasi dari Kelompok Massa Kaos Merah yang digelar di Bangkok pada Maret 2010 ini menuntut mundurnya Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, dibubarkannya parlemen dan menuntut pemerintah segera menyelenggarakan pemilihan umum. Namun Abhisit menolak tuntutan para demonstran tersebut sehingga terjadi bentrokan berdarah antara demonstran dengan militer yang telah dipersiapkan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva untuk meredam aksi massa sehingga menyebabkan puluhan orang tewas dan ratusan orang terluka dari kedua belah pihak.

Demonstrasi yang dilakukan oleh Massa Kaos Merah terhadap pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva pada tahun 2010 yang berlangsung selama tiga bulan sejak Maret hingga Mei di Thailand tidak mampu menjatuhkan Abhisit dari kekuasaannya. Namun Abhisit dapat menerima sebagian dari tuntutan para demonstran yaitu menawarkan adanya lima poin rencana rekonsiliasi dan jadwal pemilihan umum yang diadakan lebih dini. Hal ini dilakukan untuk mengakhiri kebuntuan politik selama aksi demonstrasi dari Massa Kaos Merah. Lima poin rencana rekonsiliasi tersebut adalah menghormati kerajaan, melakukan reformasi untuk mengatasi ketimpangan sosial, reformasi untuk menciptakan media yang tidak berpihak, membentuk komite independen untuk menyelidiki bentrokan fatal selama demonstrasi dan mengadakan pembahasan mengenai perlunya reformasi konstitusi.[7] Mengenai jadwal pemilihan umum, Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva menyatakan bahwa pemerintah Thailand siap untuk mengadakan pemilihan umum pada 14 November 2010.[8] Selain itu, Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva akan membubarkan parlemen antara 15–30 September 2010. Hal ini sesuai dengan konstitusi Thailand yang mengatur bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan setelah 45 hingga 60 hari setelah parlemen dibubarkan.[9]

### **Kesimpulan dan Saran**

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab hasil dan pembahasan sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan. Sebab terjadinya aksi demonstrasi Massa Kaos

Merah (*Red Shirts*) terhadap pemerintahan Abhisit Vejjajiva di Thailand pada 2010 disebabkan karena adanya konflik politik yang terjadi di kalangan elit sipil, birokrasi dan militer yang menyebabkan krisis politik yang berkepanjangan di Thailand. Massa Kaos Merah merupakan pendukung setia mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan oleh militer melalui kudeta pada 2006 dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Dalam kaca mata elit militer, militer Thailand memang menganggap Thaksin Shinawatra adalah sosok yang mengancam otoritas militer karena ia berencana merombak militer dengan memindahkan Sonthi Boonyaratkalin sebagai Panglima Angkatan Darat dan 129 perwira militer lainnya. Sementara itu dalam kaca mata elit oposisi dan kelas menengah perkotaan berbagai kebijakan Thaksin yang dianggap populis di kalangan masyarakat miskin pedesaan justru membawa kerugian bagi mereka.

Setelah Thaksin Shinawatra lengser dari posisi perdana menteri Thailand oleh kudeta militer tahun 2006 dan naiknya Abhisit Vejjajiva menjadi Perdana Menteri Thailand krisis politik di Thailand tidak kunjung reda. Thaksin yang lengser dari posisi perdana menteri dan menjadi buronan pemerintah mulai menggalang massa dari para pendukungnya yang disebut Massa Kaos Merah. Thaksin kepada para pendukungnya mengkampanyekan perlawanan terhadap pemerintahan Abhisit dan isu bahwa Abhisit tidak terpilih melalui pemilihan umum yang demokratis dan didukung oleh militer. Sementara itu Abhisit yang mengetahui rencana tersebut mengerahkan militer untuk mengamankan kekuasaannya sehingga terjadilah bentrokan berdarah antara Massa Kaos Merah yang berjumlah ribuan dengan aparat militer Thailand.

Demonstrasi yang dilakukan oleh Massa Kaos Merah terhadap pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva pada tahun 2010 yang berlangsung selama tiga bulan sejak Maret hingga Mei di Thailand tidak mampu menjatuhkan Abhisit dari kekuasaannya. Namun Abhisit dapat menerima sebagian dari tuntutan para demonstran yaitu menawarkan adanya lima poin rencana rekonsiliasi dan jadwal pemilihan umum yang diadakan lebih dini. Hal ini dilakukan untuk mengakhiri kebuntuan politik selama aksi demonstrasi dari Massa Kaos Merah. Lima poin rencana rekonsiliasi tersebut adalah menghormati kerajaan, melakukan reformasi untuk mengatasi ketimpangan sosial, reformasi untuk menciptakan media yang tidak berpihak, membentuk komite independen untuk menyelidiki bentrokan fatal selama demonstrasi dan mengadakan pembahasan mengenai perlunya reformasi konstitusi. Mengenai jadwal pemilihan umum, Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva menyatakan bahwa pemerintah Thailand siap untuk mengadakan pemilihan umum pada 14 November 2010. Selain itu, Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva akan membubarkan parlemen antara 15–30 September 2010. Hal ini sesuai dengan konstitusi Thailand yang mengatur bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan setelah 45 hingga 60 hari setelah parlemen dibubarkan.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan saran yang telah diberikan untuk menyelesaikan penelitian ini. Dalam proses penyelesaian penelitian ini tentu saja terdapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Hary Yuswandi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember; Bapak Drs. Supriyadi, M. Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional; Bapak Drs. A. Eby Hara, M.A. Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Heri Alfian, S. Sos, M. Si, selaku Dosen Pembimbing Kedua sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen di jurusan Ilmu Hubungan Internasional serta pihak akademik, ruang baca dan tata usaha di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

### Daftar Pustaka/Rujukan

- [1] Aurel Croissant, Gabriel Bruns, Marel John (Eds.). 2003. *Politik Pemilihan umum di Asia Tenggara dan Asia Timur*. Jakarta: Pensil-324 untuk Frederich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia. Hal 364
- [2] Felix Dewangga Pramudita. 2012. *Politik Negara, Pengambilan Keputusan, Kebijakan Umum, Distribusi Kekuasaan, Kekuasaan Negara*, dalam <http://misteriusman.blogspot.com/2012/06/politik-negara-pengambilan-keputusan.html> [11 November 2012].
- [3] Agus Santoso. *Karakteristik Pimpinan dan Tingkah Laku Politik di Thailand*. Jurnal Ilmu dan Budaya. 1 (Oktober 1991). Universitas Nasional. Hal.31
- [4] Sri Issundari. 2008. *Latar Belakang Kudeta Militer Thailand Pada Masa Pemerintahan PM. Thaksin Shinawatra*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta. Hal. 206– 207, dalam <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/12408203211.pdf> [11 November 2012].
- [5] Shawn W. Crispin. *Military Coup Tumbles Thailand's Thaksin*. Asia Times, 21 September 2006. Diakses dari [http://www.atimes.com/atimes/Southeast\\_Asia/HI2IAe01.html](http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/HI2IAe01.html) [1 November 2011]
- [6] *Op.cit.* Sri Issundari.
- [7] *Pemilihan Umum Thailand Dipercepat Pertengahan November* dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2010/05/04/brk,20100504-245307,id.html> [1 November 2011]
- [8] *Perdana Menteri Thailand Tawarkan Rencana Rekonsiliasi dan Tanggal Pemilu* dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2010/05/04/brk,20100504-245245,id.html> [1 November 2011]
- [9] *Parlemen Thailand Dibubarkan September* dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2010/05/06/brk,20100506-246032,id.html> [1 November 2011]